

Pengaruh Inflasi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada Tahun 2004-2025

Jemelly Prisia Simanjuntak *¹
Joko Suharianto ²

^{1,2} Universitas Negeri Medan

*e-mail : jemellysimanjuntak2@gmail.com , djoko@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengetahui tentang pengaruh makroekonomi yaitu inflasi dan kemiskinan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2004-2025 yang dimana hasilnya berpengaruh negatif dan signifikan. Metode yang digunakan adalah regresi olah data panel dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS), menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Secara simultan, kedua variabel ini berpengaruh signifikan dengan nilai kontribusi sebesar 72,4221 % variasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat dijelaskan melalui kedua variabel tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga stabilitas inflasi dan menurunkan kemiskinan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia yang menunjukkan korupsi di Indonesia semakin rendah.

Kata kunci: Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Inflasi, Kemiskinan

Abstract

This research is motivated by the importance of understanding the influence of macroeconomic factors, namely inflation and poverty, on the Corruption Perceptions Index (CPI) in Indonesia from 2004 to 2025, where the results show a negative and significant effect. The method used is panel data regression with the Ordinary Least Squares (OLS) approach, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Corruption Eradication Commission (KPK). The results of this study indicate that the inflation rate has a negative and significant effect on the Corruption Perceptions Index (CPI), and poverty also has a negative and significant effect on the Corruption Perceptions Index (CPI). Simultaneously, both variables have a significant effect, with a contribution value of 72.4221%, meaning that 72.4221% of the variation in the Corruption Perceptions Index (CPI) can be explained by these two variables. This research confirms the importance of maintaining inflation stability and reducing poverty to improve the Corruption Perceptions Index (CPI) in Indonesia, indicating that corruption in Indonesia is decreasing.

Keywords: Corruption Perceptions Index (CPI), Inflation, Poverty

PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar negara. Negara-negara seperti Denmark dan Selandia Baru seringkali menempati peringkat tinggi dengan skor di atas 85, yang dikaitkan dengan tata kelola yang transparan, badan hukum yang otonom, dan budaya integritas yang kuat. Sebaliknya, negara-negara seperti Somalia dan Venezuela memiliki skor lebih rendah, dengan peringkat di bawah 20, di mana korupsi merusak perekonomian, membatasi investasi, dan menghambat akses ke layanan publik. Pola global menunjukkan bahwa negara-negara dengan IPK yang tinggi seringkali makmur dan aman, sedangkan skor yang lebih rendah dikaitkan dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Di dalam ASEAN, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengungkapkan perbedaan yang cukup besar: Singapura mencapai skor tertinggi (83, menempati peringkat 5 teratas global), sedangkan negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja memiliki skor di bawah 30 (terendah). Tantangan yang sering muncul meliputi perbedaan skor yang timbul dari demokrasi yang rapuh, korupsi yang mengakar dalam birokrasi, kolaborasi regional yang tidak memadai (misalnya, SEAPAC yang tidak efektif), dan ketidakmampuan IPK dalam mencerminkan korupsi informal di

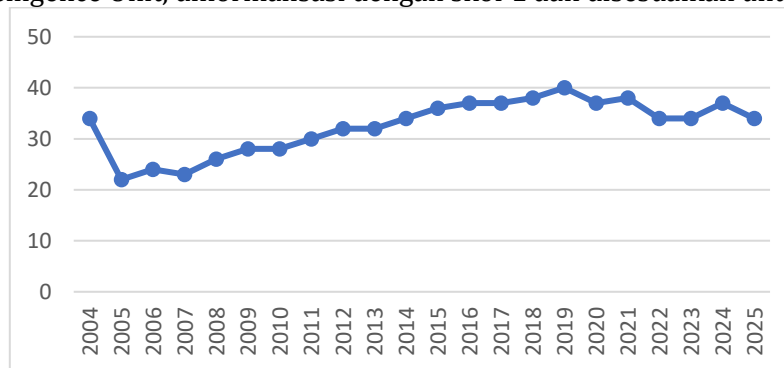
pedesaan yang umum terjadi di ASEAN. Skor rata-rata ASEAN berada di angka 45, tidak berubah karena reformasi yang tidak konsisten.

Di Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih berada di peringkat menengah ke bawah, menunjukkan kesulitan signifikan dalam memerangi korupsi. Pada tahun 2024, skor Indonesia meningkat menjadi 37, menempatkannya di peringkat ke-99 dari 180 negara, mencerminkan beberapa kemajuan berkat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2025, skor turun menjadi 34, berdampak negatif pada peringkatnya karena reformasi kelembagaan yang tidak efektif, kebijakan yang tidak konsisten, dan berkurangnya pengawasan publik. Faktor utama meliputi korupsi yang meluas dalam inisiatif infrastruktur, etika pejabat yang buruk, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum.

Dampak dari IPK yang rendah ini cukup signifikan bagi Indonesia. Investor internasional waspada untuk berinvestasi karena risiko korupsi dan ambiguitas hukum, yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan biaya hidup. Selain itu, korupsi menghambat pembangunan yang adil, sehingga distribusi layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan menjadi sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan spesifik, termasuk meningkatkan otonomi KPK, meningkatkan transparansi anggaran negara, dan melibatkan masyarakat melalui pendidikan dan pemantauan langsung. Dengan tujuan yang sama, Indonesia memiliki kapasitas untuk meningkatkan peringkat IPK-nya dan menciptakan masa depan yang lebih adil.

Korupsi termasuk di antara masalah sosial yang paling signifikan, mengikis pilar-pilar pemerintahan, ekonomi, dan keadilan secara global. Dalam bukunya "Corruption: Its Nature, Causes, and Functions," (Alatas, 1987) mendefinisikan korupsi sebagai menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, yang mencakup pelanggaran standar etika, tanggung jawab, dan kebaikan bersama. (Bank World, 1997) mengkarakterisasi korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang pemerintah untuk keuntungan pribadi, yang meliputi penyuaipan, penggelapan, dan favoritisme. (Pope, 2002), seorang anggota terkemuka Transparency International, menyatakan bahwa korupsi melanggar kepercayaan pada peran publik untuk keuntungan pribadi, mengikis integritas lembaga melalui konflik kepentingan.

Untuk menilai persepsi korupsi ini, (Internasional Transparency, 1995) yang dipimpin oleh Peter Eigen, mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang mengukur pandangan para ahli bisnis dan pengamat mengenai korupsi sektor publik di 180 negara, mulai dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). IPK menggabungkan 13 sumber data termasuk Bank Dunia dan Economist Intelligence Unit, dinormalisasi dengan skor z dan disesuaikan untuk konsistensi.



Gambar 1 Perkembangan Indeks Persepsi Di Indonesia Dari Tahun 2004-2025

Skor tersebut dimulai dari 34 pada tahun 2004, turun menjadi 22 pada tahun 2005, dan kemudian secara bertahap meningkat hingga mencapai angka tertinggi 40 pada tahun 2019. Selanjutnya, skor tersebut bervariasi, tetap berada di kisaran 34-38, dengan penurunan menjadi 34 pada tahun 2022-2023 dan 2025, meskipun terjadi peningkatan sementara menjadi 37 pada tahun 2024. Kejadian ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan manifestasi dari masalah mendasar di mana reformasi awal dirusak oleh kerapuhan institusional, campur tangan politik, dan pengaruh eksternal seperti masa pandemi.

Selama fase awal dari tahun 2004 hingga 2019, tren kenaikan umum (rata-rata meningkat 0,4 poin per tahun) menunjukkan optimisme periode Reformasi. Skor 34 pada tahun 2004 mencerminkan korupsi yang terus-menerus dari Orde Baru, termasuk kapitalisme kroni dan penyuaipan birokrasi. Penurunan tajam menjadi 22 pada tahun 2005 disebabkan oleh skandal setelah pemilihan umum 2004 dan hilangnya kepercayaan publik. Meskipun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 membawa kemajuan: skor terus meningkat menjadi 28 (2009-2010), 32 (2012-2013), dan 40 (2019) karena terungkapnya kasus-kasus penting seperti penyelamatan Bank Century dan skandal korupsi e-KTP. Kejadian ini menggambarkan dampak "terapi kejut", di mana penegakan hukum yang ketat meningkatkan pandangan investor asing. (Alatas, 1987) mendeskripsikan korupsi dalam teorinya sebagai "memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik," yang dapat dikurangi untuk sementara waktu dengan reformasi moral-institusional, sedangkan teori prinsipal agen (Bank World, 1997) menyatakan bahwa peningkatan pengawasan seperti KPK mengurangi penyalahgunaan kekuasaan pejabat.

Masalah muncul antara tahun 2020-2025, karena kemajuan terhenti dan Indonesia tetap berada di peringkat 34-38. Penurunan dari 40 (2019) menjadi 37 (2020) disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengekspos anggaran darurat terhadap korupsi, termasuk kasus bantuan sosial. Peningkatan jangka pendek menjadi 38 (2021) dan 37 (2024) terjadi karena proyek infrastruktur pada masa Jokowi, tetapi kembali turun menjadi 34 (2022-2023 dan 2025) karena amandemen Undang-Undang KPK tahun 2019 yang mengurangi kekuasaannya, pengaruh politik seperti kontroversi dinasti Prabowo-Gibran, dan korupsi di sektor hilir nikel. "Efek dataran tinggi" ini, yaitu stagnasi meskipun ditemukan kasus korupsi, menunjukkan bahwa korupsi yang terkait dengan kendali elit oleh oligarki tetap tidak ditangani, dengan suap dalam inisiatif publik (peluang 30-35%) dan administrasi daerah yang lemah. Peristiwa eksternal seperti krisis 2005 dan pandemi 2020 menyoroti kerapuhan, sedangkan lonjakan tahun 2019 yang terkait dengan Forum Ekonomi Dunia berumur pendek.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak dibuat secara acak, indeks ini dibentuk oleh berbagai faktor ekonomi, politik, sosial, dan kelembagaan yang saling terkait. Faktor-faktor penting tersebut meliputi kualitas kelembagaan, termasuk otonomi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegakan hukum; tingkat demokrasi melalui kebebasan media dan keterlibatan warga negara; stabilitas ekonomi, seperti inflasi dan tingkat kemiskinan; transparansi birokrasi; pendidikan publik; dan arus masuk investasi asing langsung. Di antara faktor-faktor ini, inflasi dan kemiskinan memberikan dampak yang sangat kuat karena keduanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan korupsi.

Inflasi merupakan faktor ekonomi kunci yang memengaruhi IPK karena menimbulkan ketidakpastian yang mendorong tindakan tidak jujur di kalangan pejabat pemerintah. Seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa yang cepat, gaji pegawai negeri tetap stagnan atau tumbuh lambat, sehingga memunculkan godaan untuk mencari "penghasilan tambahan" melalui suap atau pemerasan. Inflasi yang tinggi menyebabkan investor asing ragu-ragu untuk berinvestasi karena biaya bisnis yang tidak pasti, sehingga memperburuk pandangan umum terhadap korupsi. Misalnya, tingkat inflasi Indonesia sebesar 17% pada tahun 2005 sesuai dengan IPK yang rendah sebesar 22 poin, sedangkan inflasi yang stabil sekitar 3% pada tahun 2019 mendukung puncak IPK sebesar 40 poin. (MONALISA, 2023) menunjukkan dalam studinya, "Stabilitas makroekonomi berpengaruh positif terhadap IPK ASEAN; inflasi yang tinggi dikaitkan dengan penurunan skor melalui model efek tetap dari tahun 2010 hingga 2019."

Demikian pula, kemiskinan berdampak buruk terhadap IPK dengan cara yang lebih rumit. Di lingkungan yang menghadapi kemiskinan yang signifikan, individu seringkali menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap suap kecil untuk mendapatkan layanan publik penting, termasuk kartu identitas atau bantuan pemerintah. Otoritas di daerah miskin mengalami sedikit pengawasan publik, sehingga meningkatkan peluang penyelewengan oleh kaum elit, di mana sekelompok kecil oligarki lokal mendominasi keuangan lokal. Hubungan patron-klien yaitu hubungan di antara individu berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi (petron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada

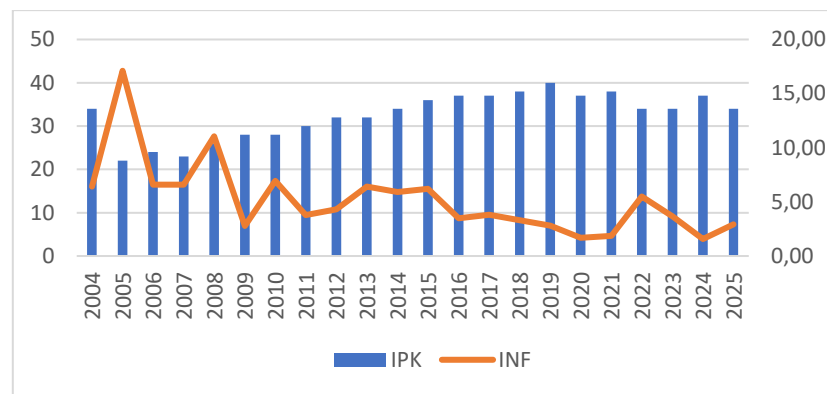
individu berstatus lebih rendah(klien) yang membalas dengan dukungan umum, loyalita, dan jasa pribadi (Scott, 1976). Dalam hal ini patron-klien menguat karena pejabat melindungi sekutu bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan. (Bank World, 1997) menyatakan dalam teori prinsipal-agennya, "Kemiskinan mengurangi pengawasan publik terhadap pejabat publik, akibatnya meningkatkan biaya keagenan yang terkait dengan korupsi." Kejadian ini terutama terlihat di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, yang sering menunjukkan skor IPK lokal yang rendah meskipun relatif sedikit kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan.

Inflasi adalah peristiwa ekonomi penting yang tidak hanya memengaruhi daya beli individu tetapi juga tindakan lembaga, termasuk tingkat korupsi. Inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan dan meluas dari waktu ke waktu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Ekonom terkemuka secara konsisten telah mengartikulasikan definisi ini. Bank Indonesia, melalui Kerangka Target Inflasi, mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan yang meluas dan berkelanjutan terhadap kenaikan harga, menyoroti karakter sistematisnya, yang memengaruhi seluruh perekonomian dan bukan hanya beberapa barang. (Boediono, 1995), dalam Teori Makroekonominya, menyatakan bahwa inflasi mewakili kenaikan harga yang meluas dan berkelanjutan, bukan hanya kenaikan pada satu atau dua barang, tetapi mengakibatkan kenaikan harga untuk sebagian besar barang lainnya. (Ackley, 1961), dalam Teori Makroekonominya, mengkarakterisasi inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang meluas dan berkelanjutan, bukan lonjakan sementara atau terbatas pada jenis barang tertentu.

Hubungan antara inflasi dan korupsi sangat penting jika dievaluasi menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (International Transparency, 1995), yang mengumpulkan pandangan para ahli bisnis mengenai korupsi sektor publik di 180 negara, mulai dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). (Robinson, 2012) dalam Why Nations Fail berpendapat bahwa inflasi yang tinggi di lembaga-lembaga ekstraktif melanggengkan siklus korupsi yang berbahaya, dengan elit politik memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi untuk mempertahankan kendali. (Budsaratragoon, P., & Jitdumrong, 2020) berpendapat bahwa IPK mewakili konstruksi sosial yang bias secara metodologis, dengan inflasi memengaruhi skor karena pengaruh signifikan dari Peringkat Risiko Negara Economist Intelligence Unit (bobot 30-40%). (Treisman, 2000) mengidentifikasi fenomena siklus bisnis politik di mana pemerintah memengaruhi waktu pengumuman kasus korupsi sebelum pemilihan untuk meningkatkan IPK secara singkat, seperti yang diamati pada lonjakan di Indonesia tahun 2019.

Dalam makalahnya yang berpengaruh "Korupsi dan Pertumbuhan," (Mauro, 1995) mengidentifikasi hubungan empiris yang signifikan: "Ketika inflasi tahunan rata-rata melebihi 15%, skor korupsi meningkat sebesar 0,8 poin (pada skala 0-6), karena ketidakstabilan makroekonomi mendorong para pejabat untuk mengejar 'pendapatan tambahan' melalui suap, yang menyebabkan distorsi dalam alokasi investasi karena premi ketidakpastian." Penelitian panel Mauro yang melibatkan 67 negara dari tahun 1980 hingga 1995 mengungkapkan koefisien regresi sebesar -0,12 ($p < 0,01$) yang menghubungkan inflasi dengan pandangan tentang korupsi.

Proses kausal ini dapat diuraikan secara menyeluruh. Pertama-tama, inflasi mendorong pejabat publik untuk mengejar suap karena gaji tetap mereka tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup. Ketika biaya beras, bensin, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya meningkat 10-20% setiap tahun, dan upah pegawai negeri hanya naik 8%, daya tarik untuk menerima "pembayaran pelicin" untuk kontrak pemerintah atau izin usaha menjadi sangat signifikan. Kedua, inflasi yang tinggi menghasilkan premi risiko bagi investor asing yang mencampur ancaman makroekonomi dengan pandangan tentang korupsi, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam FDI. Ketiga, inflasi melemahkan pengawasan sosial karena individu fokus pada krisis daya beli, yang menyebabkan penurunan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan sumber daya publik.



Gambar 2 Perkembangan Inflasi dan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2004-2025

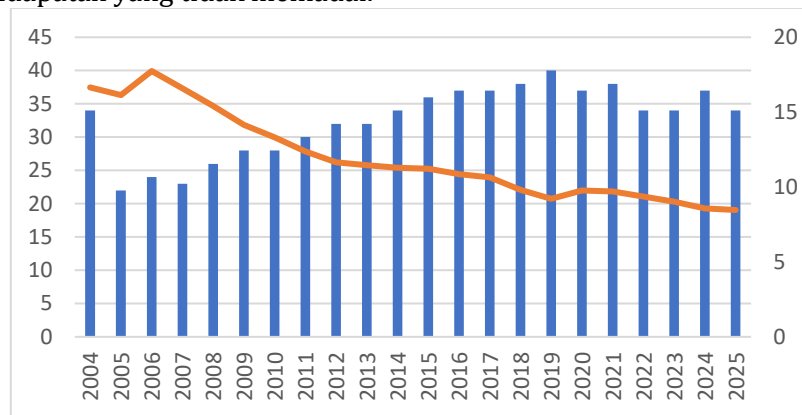
Dinamika hubungan kausal di mana inflasi bertindak sebagai variabel independen (X) yang memengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai variabel dependen (Y) di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2025 menunjukkan pola negatif yang signifikan, di mana inflasi tinggi cenderung menurunkan IPK melalui persepsi ketidakadilan ekonomi dan melemahnya pengawasan publik. Secara teoritis, hal ini didasarkan pada hipotesis korupsi yang dipicu inflasi dari para ekonom seperti (Mauro, 1995), yang menyatakan bahwa inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian ekonomi, sehingga mendorong praktik korupsi oportunistik, seperti suap untuk akses ke subsidi atau kontrak darurat, yang pada akhirnya merusak persepsi publik terhadap integritas pemerintah. Misalnya, lonjakan inflasi hingga 17,11% pada tahun 2005 langsung menekan PPN dari 34 menjadi 22 karena krisis bahan bakar yang memicu penyelewengan dana darurat. Periode 2016-2019 dengan inflasi rendah di bawah 4% memungkinkan IPK naik menjadi 37-40 karena stabilitas harga mengurangi tekanan untuk korupsi darurat dan memperkuat kepercayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2020-2025, fluktuasi inflasi seperti 5,51% pada tahun 2022 berkorelasi dengan penurunan IPK menjadi 34, sejalan dengan teori ekspektasi rasional (Lucas, 1972), di mana inflasi tinggi memicu ekspektasi publik negatif bahwa korupsi adalah respons rasional terhadap tingginya biaya hidup, sehingga secara kumulatif memperburuk persepsi, terutama pada tahun 2025 dengan inflasi 2,92%, yang masih dianggap tidak terkendali pasca-pandemi. Teori ekonomi politik inflasi sejalan dari penelitian (Alesina, A., & Tabellini, 1990) yaitu inflasi tinggi dieksploitasi oleh elit untuk korupsi pra-pemilu, menurunkan IPK melalui erosi akuntabilitas. Dasar empirisnya didukung oleh uji kausalitas Granger dari studi regional yang menemukan koefisien kausal inflasi yang menyebabkan IPK sebesar -0,62 (signifikan pada $\alpha=1\%$), karena inflasi melemahkan pengawasan sosial, meningkatkan kesenjangan, dan memicu kasus korupsi bantuan sosial; faktor-faktor seperti reformasi kelembagaan hanya memoderasi, bukan membalikkan, efek utama inflasi.

Hubungan antara inflasi dan korupsi bersifat dua arah dan merugikan. (IMF, 2021) menilai pandangan negatif terhadap inflasi yang tinggi sebagai penghambat pertumbuhan sebesar 1-2%, berdasarkan sentimen media dari Financial Times, menggunakan Sentiment-Enhanced IPK. (Sintia, 2025) menetapkan, "IPK positif yang signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN; stabilitas makroekonomi sangat penting, berdasarkan model efek tetap dari tahun 2012 hingga 2022."

Selain inflasi, kemiskinan merupakan faktor ekonomi lain yang memengaruhi korupsi. Kemiskinan mengacu pada kegagalan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar secara memadai, yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan pembangunan yang melampaui sekadar kekurangan finansial. (Soekanto, 1981) menyatakan bahwa kemiskinan muncul ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai norma masyarakat, yang menyebabkan penipisan energi fisik dan mental tanpa hasil yang produktif. (Sen, 1999) menyoroti gagasan tentang kekurangan kemampuan, dengan berpendapat bahwa kemiskinan menandakan tidak adanya kebebasan mendasar untuk menjalani kehidupan yang memuaskan,

termasuk akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, atau keterlibatan sosial yang adil, bukan hanya sekadar pendapatan yang tidak memadai.



Gambar 3 Perkembangan Persentase Kemiskinan dan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2004-2025

Interaksi antara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2025 menunjukkan korelasi terbalik yang signifikan, di mana penurunan angka kemiskinan dari 16,66% menjadi 8,47% sejalan dengan kenaikan PKP dari 34 menjadi kisaran 34-40, meskipun terdapat variasi seperti penurunan PKP menjadi 22 pada tahun 2005 ketika angka kemiskinan tetap stabil di 16,14%. Periode awal dari tahun 2004 hingga 2009 menggambarkan kesulitan transisi pasca-krisis, di mana PKP yang rendah (22-28) disertai dengan angka kemiskinan yang tinggi (14-17%) karena korupsi dalam dana rekonstruksi dan bantuan sosial melemahkan upaya pengurangan kemiskinan. Namun, mulai tahun 2010, PKP meningkat secara konsisten menjadi 37-40, sementara angka kemiskinan turun di bawah 10% karena peningkatan transparansi program BLT dan PKH setelah reformasi KPK. Dari tahun 2020 hingga 2025, IPK bervariasi (34-38) sementara kemiskinan tetap rendah (8-9%), menunjukkan penurunan kemiskinan struktural; namun, korupsi dalam bantuan pandemi dan berkurangnya pengawasan berdampak negatif pada persepsi, dengan penurunan menjadi 34 pada tahun 2022-2023 dan 2025.

Diharapkan dari penelitian ini dapat mengetahui tentang bukti tentang pengaruh dari tingkat inflasi dan kemiskinan terhadap korupsi di Indonesia selama periode dari tahun 2004-2025.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan dua variabel independent yaitu inflasi (X1) dan persentase kemiskinan (X2). Sedangkan untuk variabel dependent dalam penelitian ini adalah Indeks Persepsi Korupsi (Y). Berikut merupakan defenisi operasional variabel tersebut:

1. Inflasi dalam hal ini diproxy dari tingkat inflasi tahunan yakni persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan di Indonesia pada periode 2004-2025 (dalam satuan persen). Inflasi dihitung menggunakan rumus Laju Inflasi = [(IHK periode sekarang - IHK periode sebelumnya) / IHK periode sebelumnya] x 100% adalah indeks harga konsumen pada tahun t. Data bersumber dari Bank Indonesia (BI) atau Badan Pusat Statistik (BPS), mencerminkan tekanan harga secara agregat yang memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi korupsi melalui erosi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

2. Persentase kemiskinan dalam hal ini diproxy dari persentase penduduk miskin yakni proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia pada periode 2004-2025 (dalam satuan persen). Persentase kemiskinan dihitung sebagai Persentase Kemiskinan = (Persentase Kemiskinan / Jumlah Penduduk) x 100% dengan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan dan efektivitas

program pengentasan kemiskinan, sehingga dapat berkorelasi dengan indeks persepsi korupsi melalui dugaan penyelewengan dana bantuan sosial.

3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam hal ini diproxy dari *Corruption Perceptions Index (CPI)* yakni skor komposit antara 0-100 yang diberikan oleh *Transparency International* berdasarkan persepsi pakar dan pelaku usaha terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia pada periode 2004-2025 (dalam satuan indeks, di mana 0 menunjukkan korupsi sangat tinggi dan 100 sangat bersih). IPK dihitung sebagai rata-rata geometrik dari berbagai survei global seperti World Bank, World Economic Forum, dan lainnya, dengan normalisasi skala. Data resmi dari *Transparency International*, yang relevan sebagai variabel dependen karena mencerminkan persepsi korupsi sebagai indikator kualitas tata kelola, dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi dan kemiskinan yang melemahkan pengawasan fiskal.

c. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam data ini adalah data kuantitatif numerik yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan variabel independen yaitu Inflasi dan Kemiskinan sedangkan variabel dependennya yaitu Indeks Persepsi Korupsi (KPK) di Indonesia, tahun amatan 2007-2024. Analisis data yang digunakan menggunakan model regresi data panel. Estimasi model menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)* dan evaluasi regresi meliputi uji asumsi, uji *R-squared*, uji F, dan uji t untuk mengukur kebaikan model dan pengaruh variabel independen terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$IPK = \beta_0 + \beta_1 (FG) + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$INF = \beta_0 + \beta_1 (FG) + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

$$PK = \beta_0 + \beta_1 (FG) + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

IPK= Indeks Persepsi Korupsi (Satuan)

INF = Inflasi (Persen)

PPM = Persentase Penduduk Miskin (Persen)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

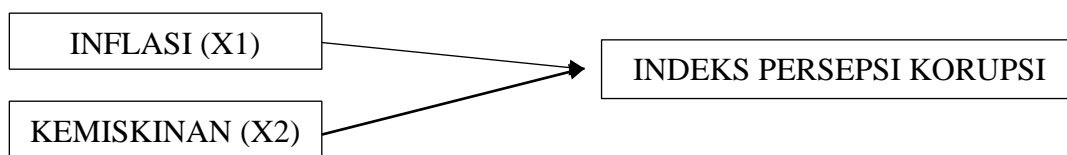
Hipotesis Parsial

H1: Diduga Inflasi berpengaruh negatif & signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia (Hub. 1 Arah)

H2: Diduga Kemiskinan berpengaruh negatif & signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia (Hub. 1 Arah)

Hipotesis Simultan

H3: Diduga Inflasi dan Kemiskinan berpengaruh negatif & signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia (Hub. 2 Arah)



Gambar 4. Rancangan Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

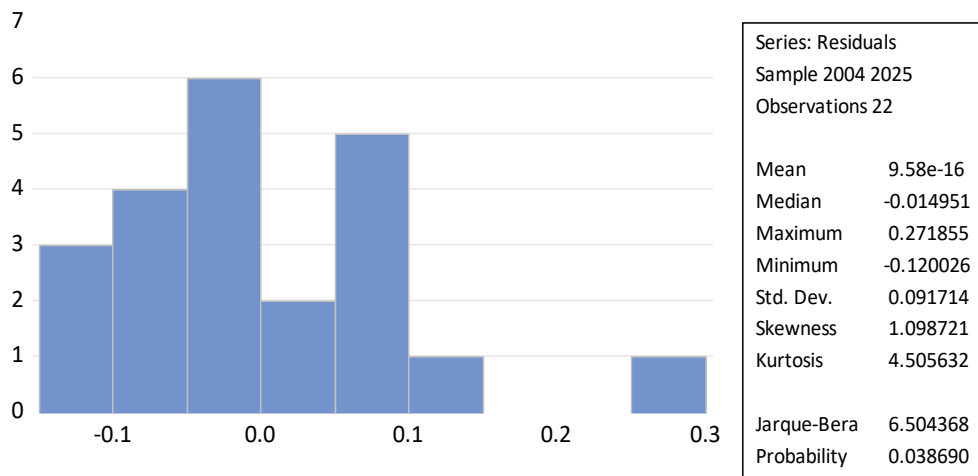
a) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk regresi data panel dengan pendekatan *Ordinary Least Squares (OLS)*. Oleh karena model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, maka pengujian multikolinieritas heteroskedastisitas dianggap cukup

untuk memastikan validitas model (Basuki & Yuliadi, 2014). Adapun hasil uji asumsi klasik model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas



Berdasarkan uji normalitas pada tabel tersebut, nilai Probability Jarque-Bera (0.038690) > α (0.05), maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos normalitas).

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
 Date: 04/05/26 Time: 19:36
 Sample: 2004 2025
 Included observations: 22

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.007990	18.90635	NA
LOG(INF)	0.002452	14.63868	1.921366
PK	0.000100	35.90070	1.921366

Diketahui nilai VIF Variabel Independen <10.00 yaitu 1.1921366 maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinieritas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.215120	Prob. F(2,17)	0.3212
Obs*R-squared	2.751653	Prob. Chi-Square(2)	0.2526

Diketahui nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0.2526 (>0.05) maka bisa disimpulkan bahwa uji asumsi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.767340	Prob. F(2,19)	0.1977
Obs*R-squared	3.450813	Prob. Chi-Square(2)	0.1781
Scaled explained SS	4.511486	Prob. Chi-Square(2)	0.1048

Diketahui nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0.1781 (>0.05) maka bisa disimpulkan bahwa uji asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

b) Uji Hipotesis

Dalam proses penelitian, salah satu dilakukan adalah uji hipotesis Statistik pengujian dalam penelitian dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu uji parsial (uji t-statistik), uji f-statistik dan uji koefisien determinasi.

Tabel 5. Uji Hipotesis

Dependent Variable: LOG(IPK)
 Method: Least Squares
 Date: 04/05/26 Time: 19:32
 Sample: 2004 2025
 Included observations: 22

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.050057	0.089384	45.31070	0.0000
LOG(INF)	-0.073510	0.049522	-1.484380	0.1541
PK	-0.039561	0.010005	-3.954274	0.0009
R-squared	0.724221	Mean dependent var		3.467400
Adjusted R-squared	0.695192	S.D. dependent var		0.174644
S.E. of regression	0.096420	Akaike info criterion		-1.714079
Sum squared resid	0.176640	Schwarz criterion		-1.565301
Log likelihood	21.85487	Hannan-Quinn criter.		-1.679031
F-statistic	24.94793	Durbin-Watson stat		1.172938
Prob(F-statistic)	0.000005			

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan bahwa ;

1. Diperoleh nilai t hitung INFLASI sebesar 4,033338 < t tabel 2,119905 dan nilai Prob sebesar 0,0011 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, Inflasi berpengaruh signifikan terhadap IPK
2. Diperoleh nilai t hitung PK sebesar 1,751912 < t tabel 2,119905 dan nilai Prob sebesar 0,1002 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, PK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPK.
3. Diperoleh nilai F hitung sebesar 13,62469 > F tabel 3,68 dan Prob sebesar 0,000424 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, INFLASI dan PK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPK.

Pembahasan

a) Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Artinya, kenaikan inflasi menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara signifikan. Dalam hal ini dengan IPK yang rendah menunjukkan semakin tingginya tingkat korupsi di negara tersebut sehingga dalam hal ini inflasi yang tinggi meningkatkan tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung teori (Mauro, 1995), yang menyatakan bahwa inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian ekonomi, sehingga mendorong praktik korupsi oportunistik, seperti suap untuk akses ke subsidi atau kontrak darurat, yang pada akhirnya merusak persepsi publik terhadap integritas pemerintah. Selain itu, (Robinson, 2012) dalam Why Nations Fail berpendapat bahwa inflasi yang tinggi di lembaga-lembaga ekstraktif melanggengkan siklus korupsi yang berbahaya, dengan elit politik memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi untuk mempertahankan kendali.

Oleh karena itu, inflasi berpengaruh negatif dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia, dalam hal ini ditegaskan bahwa pentingnya kebijakan untuk menunak inflasi dan sesuaikan tingkat inflasi dengan gaji pegawai pemerintahan dan juga tingkatkan pengawasan ketat dari KPK dan juga sanksi yang lebih berat kepada para koruptor.

b) Pengaruh Kemiskinan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Persentase Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Artinya, semakin tingginya kemiskinan menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan signifikan. Dalam hal ini, semakin tingginya masyarakat miskin meningkatkan jumlah koruptor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, bahwa kemiskinan sistemik mendorong korupsi oportunistik karena orang miskin lebih rentan untuk menawarkan atau menerima suap untuk layanan penting seperti bantuan sosial, pekerjaan, atau subsidi, sehingga merusak tata kelola dan kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan (Mauro, 1995). Selain itu, Otoritas di daerah miskin mengalami sedikit pengawasan publik, sehingga meningkatkan peluang penyelewengan oleh kaum elit, di mana sekelompok kecil oligarki lokal mendominasi keuangan lokal. Hubungan patron-klien yaitu hubungan di antara individu berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi (petron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada individu berstatus lebih rendah (klien) yang membalas dengan dukungan umum, loyalita, dan jasa pribadi (Scott, 1976).

Oleh karena itu, pentingnya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak selalu bergantung pada subsidi yang dimana kegiatan tersebut meningkatkan resiko suap yang dilakukan pemerintah. Selain itu, dengan menurunnya masyarakat miskin dapat mengurangi resiko hubungan patron-klien yang menguasai dana bantuan sosial, proyek desa, dan pekerjaan untuk ditukar dengan loyalitas politik serta jasa dari masyarakat miskin.

c) Pengaruh Inflasi dan Persentase Penduduk Kemiskinan Terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan inflasi dan Persentase Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Artinya hipotesis terbukti kebenarannya. dalam hipotesis menunjukkan r-squared 0,724221 atau sekitar 72,4221 % variasi dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dapat dijelaskan oleh variabel independen tersebut, sementara sisanya 0,275779 atau sekitar 27,5779 % dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Maka dari hasil uji data ini terbukti bahwa stabilitas makro ekonomi seperti inflasi dan kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Dalam hal ini mendukung penelitian dari (MONALISA, 2023) menunjukkan dalam studinya, "Stabilitas makroekonomi berpengaruh positif terhadap IPK ASEAN; inflasi yang tinggi dikaitkan dengan penurunan skor melalui model efek tetap dari tahun 2010 hingga 2019."

KESIMPULAN

Maka dari penelitian ini dapat diketahui bahwa inflasi dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2025. Dalam hal ini maksudnya adalah semakin tinggi tingkat inflasi dan kemiskinan di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat korupsi di Indonesia karena semakin rendah indeks persepsi korupsi di suatu negara menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Penelitian ini dibuktikan dari hasil uji data eviews yang menunjukkan uji data empiris yang menunjukkan koefisien regresi yang negatif dan signifikan dalam statistik. Maka tingginya inflasi mencerminkan adanya ketidakstabilan ekonomi yang mendorong kesempatan untuk melakukan korupsi untuk bertahan hidup, dan tingginya kemiskinan yang lebih rentan untuk menerima suap dari dana bantuan berupa subsidi, pendidikan dan sebagainya selain itu memperburuk pelayanan dan pengawasan publik sehingga lebih rentan adanya tindakan korupsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi di suatu negara tidak hanya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat namun juga berpengaruh untuk mendorong tindak korupsi di suatu negara. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya untuk menjaga kestabilan inflasi dan mengurangi kemiskinan agar IPK di Indonesia meningkat yang menunjukkan bahwa tindak korupsi semakin rendah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saran bagi pemerintah yaitu pentingnya untuk menjaga stabilitas inflasi dari kebijakan moneter melalui bank sentral seperti menjaga suku bunga dan meningkatkan devisa negara selain itu pembinaan kepada masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. Selain itu, untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan bantuan bagi masyarakat miskin untuk pembekalan membuka usaha disertai dengan transparansi pengeluaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat. pemerintah juga disarankan agar lebih transparan dalam pengeluaran pemerintah kepada masyarakat dan lebih memperketat sistem hukum dan sanksi tegas bagi para koruptor. Dengan menerapkan saran-saran ini maka diharapkan agar Indonesia dapat mengurangi tindak korupsi di Indonesia dari menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia yaitu menjaga inflasi tetap stabil dan mengurangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley, G. (1961). (1961). *Macroeconomic theory*. Macmillan.
- Alatas, S. H. (1987). *Corruption : its nature, causes, and functions*. Avebury.
- Alesina, A., & Tabellini, G. (1990). A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt. *Review of Economic Studies*, 57(3), 403–414.
- Bank, W. (1997). *Helping Countries Combat Corruption*.
- Basuki, A. T. R. I., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic data processing* (1st ed.).
- Boediono. (1995). *Teori ekonomi makro (Edisi kedua)*. BPFE-Yogyakarta.
- Budsaratragoon, P., & Jitdumrong, S. (2020). A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approach. *Research in International Business and Finance*, 53. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012118301411>
- IMF. (2021). *A sentiment-enhanced corruption perception index*.
- International, T. (1995). *Corruption Perceptions Index*. https://files.transparencycdn.org/images/1995_CPI_EN.pdf
- Lucas, R. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. *Journal of Economic Theory*, 4(2), 103–124.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110, 681-712 (32 pages). <https://doi.org/10.2307/2946696>
- MONALISA, J. T. (2023). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PERSEPSI KORUPSI: STUDI KASUS NEGARA ANGGOTA ASEAN (2010 – 2019)*. Universitas Diponegoro.
- Pope, J. (2002). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Transparency International, 2000.
- Robinson, A. dan. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Scott, J. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University.
- Sintia, N. (2025). *Pengaruh indeks persepsi korupsi, indeks pembangunan manusia, dan foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara Lower Middle Income ASEAN [Universitas Bangka Belitung]*. <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10773/>
- Soekanto, S. (1981). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)